



PELATIHAN PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN IPS BERORIENTASI PADA PERPRES NOMOR 87 TAHUN 2017 BAGI GURU MGMP IPS SMP PEKALONGAN SEBAGAI WUJUD KONSERVASI SOSIAL
Arif Purnomo[✉], Abdul Muntholib, Ferani Mulianingsih, Jefri Aristiadi, Fansuri Nur Hidayat.

Faculty of Social Science, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel*Sejarah Artikel:*

Disubmit November 2019
Direvisi Desember 2019
Diterima Desember 2019

Keywords:

Social Studies Learning Tools, Perpres Number 87 of 2017

Abstrak

Tujuan dalam pengabdian masyarakat sebagai berikut: (1) menganalisis pengetahuan tentang pemberian pelatihan pengembangan perangkat pembelajaran IPS berorientasi pada Perpres Nomor 87 Tahun 2017 bagi guru MGMP IPS SMP Pekalongan Sebagai Wujud Konservasi Sosial; (2) melatih perangkat pembelajaran IPS berorientasi pada Perpres Nomor 87 Tahun 2017 bagi guru MGMP IPS SMP Pekalongan. Metode pelaksanaan pengabdian ini antara lain memaparkan persoalan prioritas; merinci justifikasi permasalahan dan solusi; melakukan pendekatan pengabdian melalui ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab, curah pendapat, dan demonstrasi; merinci prosedur kerja. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat yaitu peserta pengabdian sangat antusias pada materi Perpres No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Pada tahap kedua pengabdian yaitu melaksanakan implementasi Perpres No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dalam perangkat pembelajaran. Simpulan dalam pengabdian masyarakat ini yaitu terdapat Pengembangan Perangkat Pembelajaran IPS Berorientasi Pada Perpres Nomor 87 Tahun 2017 Bagi Guru MGMP IPS SMP Pekalongan Sebagai Wujud Konservasi Sosial.

Abstract

The objectives of community service are as follows: (1) analyzing knowledge about providing training in the development of social studies learning tools oriented to Perpres Number 87 of 2017 for MGMP IPS teachers in Pekalongan Middle School as a Form of Social Conservation; (2) train IPS-oriented learning tools in Perpres Number 87 of 2017 for MGMP IPS teachers in Pekalongan Middle School. The methods for carrying out this service include outlining priority issues; detailing the justification of problems and solutions; approaching service through lectures, group discussions, questions and answers, brainstorming, and demonstrations; detail work procedures. The results of community service activities, namely community service participants, were very enthusiastic about the Presidential Regulation no. 87 of 2017 concerning Strengthening Character Education. In the second stage of service, namely implementing the Presidential Regulation No. 87 of 2017 concerning Strengthening Character Education in learning tools. The conclusion in this community service is the Development of Social Studies Learning Tools Oriented to Perpres Number 87 of 2017 For Teachers' Teachers Social Sciences MGMP Pekalongan Middle School as a Form of Social Conservation.

© 2019 Universitas Negeri Semarang

[✉] Alamat korespondensi:
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
Email: arifpurnomo32@mail.unnes.ac.id

PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa kesempatan kerja sangat terbatas dan tidak berbanding linear dengan lulusan lembaga pendidikan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2018, sebesar 7.001.000 orang. Jumlah pengangguran sarjana atau lulusan universitas sebesar 5,89% (<http://m.detik.com>). Bahkan dinyatakan bahwa pengangguran di Indonesia sudah menjadi ancaman di ASEAN, di mana kontribusi Indonesia pada angka pengangguran sudah mencapai 60%. Kondisi ini terjadi karena banyaknya mahasiswa ketika lulus kuliah, hanya ingin menjadi seorang pegawai. Hal ini terlihat dari hasil berbagai survei melalui wawancara dengan para mahasiswa, yang dilansir okezone.com, sekitar 75% menjawab akan melamar kerja atau menjadi pegawai (karyawan), dan hanya sekitar 4% yang menjawab ingin berwirausaha. Berdasarkan penelitian yang dilansir okezone.com itu juga dinyatakan bahwa mahasiswa sulit untuk mulai berwirausaha dengan alasan mereka tidak diajar dan dirangsang untuk berusaha sendiri dan mereka kurang mampu dan mau menciptakan lapangan kerja sendiri.

Keadaan seperti digambarkan di atas harus diatasi karena pengangguran adalah salah satu permasalahan pembangunan yang sangat kritis. Salah satu solusinya adalah dengan mencetak lulusan lembaga pendidikan yang memiliki potensi untuk mengembangkan keterampilannya menjadi usaha mandiri. Selain menjadi solusi bagi dirinya, usaha mandiri ini mendatangkan berkah bagi orang lain yang direkrut sebagai karyawan ataupun buruh pada usaha yang dirintisnya. Sayangnya, generasi muda tidak dibesarkan dalam budaya wirausaha. Dengan kata lain, sarjana lulusan perguruan tinggi tidak bisa lagi sekedar mengandalkan ijazah untuk mencari pekerjaan, namun dituntut memiliki kompetensi dan keterampilan yang dimiliki, agar dapat mencari lapangan kerja yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Salah satu alternatif mengatasi masalah tersebut adalah dengan menanamkan jiwa wirausaha pada mahasiswa sejak dini.

Di kalangan mahasiswa minat untuk bergelut di bidang wirausaha boleh dikata masih sangat minim. Mereka masih berpikir bahwa kuliah hanya untuk menjadi karyawan atau pegawai. Selain itu, ada beberapa faktor yang menyebabkan mahasiswa kurang berminat untuk berwirausaha yaitu tidak ada modal untuk memulai usaha, atau tidak pernah dibekali dengan pengetahuan seputar wirausaha. Padahal sebenarnya gelar sarjana tidak menjamin seseorang untuk mendapatkan pekerjaan. Pola pikir mahasiswa yang demikian perlu dibenahi agar dapat lebih memahami seberapa besar peranan wirausaha dalam kehidupan sehari-hari.

Peran pendidikan khususnya pada perguruan tinggi sangat penting untuk menumbuhkan minat mahasiswa dalam berwirausaha sehingga terbatasnya lapangan pekerjaan tidak lagi menjadi masalah besar karena mahasiswa sudah mampu menjalankan usaha sendiri. Untuk lebih meningkatkan kemampuan mahasiswa, pemerintah sudah memberi wadah bagi mahasiswa yang mau belajar. Pada tahun 2009, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sudah memperkenalkan dan mengembangkan berbagai program kewirausahaan yang dikenal dengan Program Mahasiswa Wirausaha yang disingkat PMW, dimana wadah ini menjadi jembatan bagi mahasiswa untuk dapat membangun motivasi berwirausaha dan mampu melihat peluang yang ada disekitarnya. Banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan berwirausaha seperti meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam bidang kewirausahaan agar tercipta kader pengusaha muda yang berpotensi, mampu memenuhi kebutuhan sendiri, menciptakan lapangan kerja bagi orang lain sehingga membantu pemerintah dalam mengurangi masalah pengangguran di Indonesia. Hal ini boleh jadi membawa perubahan bagi Indonesia kearah yang lebih baik, karena sejatinya perbaikan nasib negeri itu harus berdasar pada kemauan, keuletan dan kerja keras.

Bagi umumnya orang Indonesia, memang memulai usaha dan menciptakan lapangan kerja sejak dini bukanlah kebiasaan yang lazim dilakukan. Penyebabnya, menurut Agung B

Waluyo, Manajer Pendidikan Universitas Ciputra *Entrepreneurship Center*, dipengaruhi oleh dua hal. *Pertama*, selama 350 tahun masa penjajahan sebagian besar rakyat Indonesia tidak mendapat pendidikan yang seharusnya. *Kedua*, pendidikan kita memiliki orientasi membentuk SDM pencari kerja, bukan pencipta kerja (www.hotlinkfiles.com).

Mindset sebagai pencari kerja semakin membuat tingginya angka penganggur di Indonesia. Padahal, menurut penelitian, setiap pertumbuhan ekonomi 1% hanya mampu menciptakan sekitar 265.000 lapangan kerja baru. Dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkisar 6% berarti hanya tersedia sekitar 1.590.000 lapangan kerja baru. Lulusan sarjana setiap tahunnya lebih dari 300.000 orang. Akibatnya, banyak terjadi penganggur terdidik. Cerita-cerita ironis bisa didengar. Ada sarjana nuklir yang berjualan es krim atau insinyur pesawat terbang menjadi pemulung. Bahkan, penelitian Payaman J Simanjuntak melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyebutkan, tiga dari 10 tukang ojek di Jakarta adalah sarjana.

Tingginya pengangguran dan rendahnya kesejahteraan di Indonesia dipengaruhi oleh kecilnya jumlah wirausahawan (*entrepreneur*). Menurut David McClelland, suatu negara akan menjadi makmur apabila memiliki wirausahawan sedikitnya 2% dari jumlah penduduk. Singapura, menurut *Global Entrepreneurship Monitor* (GEM) tahun 2013, memiliki sebanyak 7,2 %, sedangkan Amerika Serikat tahun 2014 memiliki 11,5 % *entrepreneur*. Indonesia diperkirakan hanya 400.000 orang yang tercatat menjadi pelaku usaha yang mandiri, atau sekitar 0,18 % dari populasi. Dengan jumlah penduduk sebesar 240 juta, sebenarnya Indonesia membutuhkan 4,4 juta wirausahawan.

Bagaimana menghasilkan wirausaha sebanyak itu? Menurut Ciputra, sosok wirausahawan adalah seorang yang mampu mengubah kotoran dan rongsokan menjadi emas. Namun, orang Indonesia tidak perlu memulai dari kotoran dan rongsokan. Indonesia dianugerahi dengan kelimpahan potensi sumber

daya alam, seperti energi, aneka komoditas, dan bahan-bahan tambang yang luar biasa. Namun, produk-produk itu kurang mendapat sentuhan sehingga tidak menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Berkaitan dengan hal ini, beberapa ahli bahwa kewirausahaan merupakan proses pengembangan dan penerapan kreatifitas serta inovasi dalam menyelesaikan masalah dan mampu melihat peluang untuk menciptakan suatu usaha (Zimmerer, dalam Sudaryana, 2003), kewirausahaan merupakan suatu proses untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (Drucker, dalam Sudaryana, 2003), kewirausahaan merupakan suatu nilai yang terwujud dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tujuan, kiat, proses dan hasil bisnis (Ahmad, 1994). Dari beberapa pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan adalah suatu proses pengembangan dan penerapan kreatifitas untuk menciptakan inovasi-inovasi baru yang terwujud dalam perilaku, baik dilingkungan masyarakat atau lebih khusus di kalangan mahasiswa.

METODE

Prosedur kerja dalam pengabdian kepada masyarakat dengan judul Pelatihan Pengembangan Perangkat Pembelajaran IPS Berorientasi Pada Perpres Nomor 87 Tahun 2017 Bagi Guru MGMP IPS SMP Pekalongan Sebagai Wujud Konservasi Sosial antara lain.

1. Perencanaan kegiatan pengabdian, terdiri dari:
 - a. Studi lapangan mengenai permasalahan mitra pengabdian.
 - b. Penyusunan materi tentang pendidikan karakter sebagai wujud konservasi sosial.
 - c. Penyusunan strategi Pelatihan Pengembangan Perangkat Pembelajaran IPS Berorientasi Pada Perpres Nomor 87 Tahun 2017 Bagi Guru MGMP IPS SMP Pekalongan Sebagai Wujud Konservasi Sosial.
2. Pelaksanaan, terdiri dari:

- a. Menjelaskan tentang pendidikan karakter sebagai wujud konservasi sosial.
 - b. Pendampingan implementasi pendidikan karakter sebagai wujud konservasi sosial.
3. Evaluasi hasil pelaksanaan pengabdian, Tim pengabdian kepada masyarakat mengevaluasi hasil pelatihan.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini secara umum telah sesuai dengan target tim pengabdian, mulai dari jumlah peserta, hasil yang diharapkan, dan evaluasi yang berjalan dengan lancar, walaupun ada berbagai hambatan, misalnya, berkaitan dengan penentuan waktu pelatihan yang tepat. Namun, akhirnya semua itu dapat dipecahkan dengan baik berkat kerja sama semua pihak yang mendukung terselenggaranya kegiatan ini.

Pengabdian masyarakat ini diikuti oleh para guru yang tergabung dalam MGMP IPS SMP Pekalongan. Pelaksanaan pengabdian ini terdiri dari dua sesi. Sesi yang pertama membahas tentang Perpres No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dan sesi kedua yaitu implementasi Perpres No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dalam pembelajaran IPS.

Perpres tersebut memuat beberapa tujuan dari PPK, diantaranya: 1) Membangun dan membekali Peserta Didik sebagai generasi emas Indonesia Tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan; 2) mengembangkan *platform* pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia. Hal tersebut sesuai yang tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003.

Pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 (UU Sisdiknas) disebutkan bahwa, pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Dari UU Sisdiknas tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional.

Sesi pertama dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu tentang Perpres No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Sesuai peraturan Presiden RI No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter untuk menjadikan mahasiswa menjadi pribadi yang hebat meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, pekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggungjawab. Maka tim pengabdian menyelenggarakan pelatihan penguatan karakter yang dilaksanakan di MGMP IPS SMP Pekalongan.

Peserta pengabdian sangat antusias dalam kegiatan pengabdian masyarakat, hal ini dapat dilihat pada Gambar 5.1. Materi ini dirasa penting untuk disampaikan karena peserta pelatihan adalah para guru. Dengan pemberian materi ini diharapkan ada peningkatan pembelajaran di kelas, dan keberhasilannya dapat diukur.

Dalam sesi kedua, disampaikan materi tentang implementasi Perpres No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dalam pembelajaran IPS dapat dilihat pada Gambar 5.2. Dalam sesi ini juga, pengabdian menyarankan, supaya guru IPS yang tergabung dalam MGMP IPS SMP Pekalongan dapat mengimplementasikan Perpres No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dalam pembelajaran IPS. Melalui perangkat pembelajaran, proses pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran IPS.

Dalam mengimplementasikan pendidikan karakter terdapat tiga tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap monitoring dan evaluasi. Pertama, tahap perencanaan. Dalam tahap ini masing-masing guru telah memiliki kesiapan dalam mengimplementasikan pendidikan karakter, karena sebelum peraturan tentang pendidikan karakter dikeluarkan oleh dinas pendidikan, ada beberapa sekolah yang sudah menjalankan program penanaman karakter.

Kedua, tahap pelaksanaan. Dalam tahap ini guru di sekolah masing-masing mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter dalam mata pelajaran IPS. Di dalam RPP, nilai-nilai pendidikan karakter yang akan dikembangkan tercantum pada bagian kegiatan pembelajaran dan direalisasikan melalui penggunaan metode-metode pembelajaran yang sesuai. Selain itu, guru di sekolah mengimplementasikan pendidikan karakter melalui kegiatan pengembangan diri dan ekstrakurikuler. Dalam kegiatan pengembangan diri, sejak siswa memasuki sekolah sudah diterapkan penanaman karakter melalui kegiatan pembiasaan atau kegiatan rutin, kegiatan spontan, dan kegiatan keteladanan. Di dalam setiap kegiatan terdapat muatan nilai-nilai karakter yang akan ditanamkan kepada siswa.

Ketiga, tahap monitoring dan evaluasi. Pada tahap monitoring dan evaluasi, program pendidikan karakter tidak dilakukan pada pertemuan pengabdian berikutnya. Dalam mengimplementasikan pendidikan karakter ternyata hamper semua guru terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi diantaranya adalah jumlah siswa yang banyak. Dengan jumlah siswa yang banyak maka pengawasan yang dilakukan semakin susah.

Kendala selanjutnya adalah pengaruh dari lingkungan di luar sekolah. Sekolah mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap siswa ketika berada di luar lingkungan sekolah yang disana terdapat berbagai macam pengaruh terhadap karakter siswa. Siswa dapat terpengaruh oleh hal-hal atau perilaku yang kurang mendidik sehingga hal tersebut menyebabkan kurang berhasilnya program

pendidikan karakter yang telah dilaksanakan oleh sekolah.

SIMPULAN

Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan oleh tim pengabdian, terdapat Pengembangan Perangkat Pembelajaran IPS Berorientasi Pada Perpres Nomor 87 Tahun 2017 Bagi Guru MGMP IPS SMP Pekalongan Sebagai Wujud Konservasi Sosial yang dilaksanakan dalam rangka pengabdian pada masyarakat ini pada umumnya memperoleh antusiasme yang besar dari para peserta. Mulai dari metode yang dilaksanakan sekaligus juga materi yang disampaikan memberikan wawasan yang baru bagi peserta. Demikian pula, dengan tawaran kesediaan tim pengabdian sebagai pendamping atau pembimbing dalam proses penelitian yang nantinya dilakukan oleh para guru menjadikan respon positif dan dianggap memudahkan mereka.

Antusias para peserta pelatihan menjadikan optimisme tersendiri bagi pengembangan keilmuan dan pengajaran di sekolah. Dengan penelitian yang dilakukan para guru, diharapkan inovasi pembelajaran akan dapat dicapai. Pada akhirnya pelatihan ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan tambahan ilmu dan wawasan yang berharga baik bagi peserta maupun bagi tim pengabdian.

DAFTAR PUSTAKA

- Detik. <https://news.detik.com/berita/d-3630887/jokowi-teken-perpres-pendidikan-karakter-Peraturan-Presiden-No.-87-Tahun-2017>
- Depdiknas. 2005. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.